

## SUMMARY

# PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Created by APIT ABDUL MAJID

**Subject** : HUKUM, PROTOKOL, KESEHATAN  
**Subject Alt** : LAW, PROTOCOL, HEALTH  
**Keyword** : Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Satpol PP

### Description :

Apit Abdul Majid, (20180402068). Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah kota administrasi jakarta barat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah kota administrasi jakarta barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah kota administrasi jakarta barat. b. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah kota administrasi jakarta barat. Penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research) serta wawancara, dan dianalisis dengan menggunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di kota administrasi jakarta barat mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah pusat maupun peraturan kepala daerah serta peraturan lainnya seperti keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Dengan menggunakan asas desentralisasi, pelaksanaan urusan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan TNI dan POLRI. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan dimana yang menjadi faktor pendukung adalah telah diterapkannya Peraturan Gubernur No 79 tahun 2020 tentang peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, sebagai alas hukum penerapan sanksi progresif dalam bentuk dukungan secara peraturan. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah faktor penegak hukum dikarenakan kurangnya jumlah personil Satpol PP kota administrasi jakarta barat. Kesimpulan penelitian ini adalah penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh pemerintah kota administrasi jakarta barat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kota administrasi, yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dilwilayahnya. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah hendaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta kedepannya membuat kebijakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang lebih kuat, agar dapat membawa perubahan yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum. Serta kedepannya, dalam melaksanakan penegakan hukum agar membangun kemitraan dengan instansi terkait melalui koordinasi terpadu dan meningkatkan upaya preventif dengan melibatkan banyak stakeholder.

**Contributor** : Dr. HELVIS, SH,MH  
**Date Create** : 24/06/2022  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Master-20180402068

**Collection** : 20180402068  
**Source** : Master Theses of Law  
**Relation Collection** Fakultas Hukum  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : @2022 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor